

DINAS SOSIAL BUTON SELATAN
SOSIALISASIKAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO



Kompasiana.com/dok Adi Assegaf

Seiring beralihnya bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) yang beralih ke bantuan sosial sembako, Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan mengadakan sosialisasi bantuan sosial sembako kepada jajaran Pemkab Buton Selatan dari mulai kepala desa atau lurah, seluruh camat, koorteks, pendamping bansos (TKSK), supplier, dan seluruh agen e-waroong yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan, Rabu 12 Februari 2020, di Gedung Wisata Batauga. Kepala Dinas Sosial Busel, H. La Ode Taatlan, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa Program Sembako merupakan pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui program dimaksud dimana indeks bantuan bertambah menjadi Rp150.000/kpm.

Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Buton Selatan, dalam sambutannya yang diwakili oleh asisten pemerintahan dan kesra, menyampaikan bahwa Kabupaten Buton Selatan sudah siap melaksanakan program bansos sembako dengan menggandeng pihak PT Bank BRI cabang Baubau, Perum Bulog Sub Divre Baubau, para agen, dan supplier. Tujuan pemberian bansos sembako ini salah satunya untuk mengatasi *stunting*, karena di dalamnya sudah ada sumber karbohidrat, sumber protein nabati, dan sumber protein hewani.

Beralihnya program BPNT ke bansos sembako diharapkan mendapatkan dukungan dan kerja sama yang sinergi antara unsur pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan dalam pembenahan data para penerima manfaat. Adapun yang menjadi kendala saat ini, mengenai penginputan data hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan yang telah dilakukan tahun lalu belum maksimal, karena masih terbatasnya sarana pendukung berupa jaringan internet dan spek komputer yang belum memenuhi standar.

Pemkab Buton Selatan terus berupaya agar masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan. Berdasarkan data tahun 2019, ada 4.493 jiwa di daerah syiar Islam pertama di Tanah Buton itu yang menerima bantuan sembako. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Ode Taatlan menuturkan, besaran bantuan sembako sejak tahun lalu hingga Februari ini sebesar

Rp150.000/pkm, dan akan menaikkan besaran bantuan menjadi Rp200.000/pkm yang sudah dikemas dalam bentuk sembako pada Maret hingga Agustus nanti.

Berkat bantuan sembako, angka kemiskinan di bumi beradat Buton Selatan berkurang. Setiap tiga bulan pihak Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan terus memutakhirkan data fakir miskin yang berhak menerima bantuan sembako.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultranet.com/dinas-sosial-buton-selatan-sosialisasikan-bansos-sembako/>, Kamis 13 Februari 2020.
2. <https://inilahsultra.com/2020/03/12/4493-jiwa-terima-bantuan-sembako-pemkab-busel/>, Kamis 13 Maret 2020.

Catatan:

1. Kesejahteraan Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka 1 menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Bantuan Sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 15 menyatakan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
3. Risiko Sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, Pasal 1 angka 16 yang menyatakan “kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.